

ABSTRAK

Kegiatan praktek politik uang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengisyaratkan adanya pelaksanaan hak dasar seperti hak menyatakan pendapat, hak berkumpul, dan berserikat yang kesemuanya memerlukan suatu aturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar payung hukum. Larangan terhadap praktek politik uang dalam pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Penegakan hukum larangan pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih baik dalam pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah meskipun dalam prakteknya kasat mata dan bukan lagi merupakan rahasia umum, akan tetapi penegakan hukumnya terasa sangat lemah. Jarang sekali bahkan mungkin belum pernah terjadi, penegakan hukum dilakukan terhadap calon kepala daerah maupun wakilnya yang kedapatan melakukan pemberian uang atau materi lainnya yang dikenal dengan istilah politik uang untuk memenangkan pasangannya dilakukan secara transparan, apalagi sampai di pengadilan. Dalam prakteknya penegakan hukum hanya dilakukan terhadap orang yang tertangkap tangan memberikan uang agar dalam pemilihan daerah memilih calon tertentu. Padahal orang yang tertangkap tersebut hanya merupakan suruhan pihak lain, misalnya Tim Kampanye, Tim Sukses maupun Calon Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah.

Penegakan hukum sangat lemah dan tidak efektif serta tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku praktik politik uang, disamping itu praktik politik uang juga tetap berlangsung meskipun undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah telah diganti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum politik uang pemilihan kepala daerah, untuk menemukan kekurangan-kekurangan penegakan hukum politik uang serta untuk merekonstruksi penegakan hukum politik uang pemilihan kepala daerah yang berbasis hukum progresif.

Hasil penelitian dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi memisahkan sanksi administrasi berupa pembatalan calon kepala daerah-wakil kepala daerah yang terbukti melakukan praktik politik uang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten maupun Kota atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten atau Kota dimana pemilihan kepala daerah tersebut berlangsung dan tidak usah menunggu proses pidananya. Sedangkan proses pemeriksaan pelanggaran pidana terhadap pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Penegakan Hukum, Politik Uang

ABSTRACT

The practice of money politics is contrary to the principles of democracy which suggests that the implementation of fundamental rights such as the right of expression, the right of assembly, and association which would require a rule of law that can be used as the basis for legal protection. The prohibition against the practice of money politics in the election of Regional Head stipulated in Article 47 and Article 73 of Law No. 8 of 2015.

Law enforcement ban on the provision of money or other materials to influence voters in both the legislative elections and the elections of regional heads although in practice the naked eye and is no longer a public secret, but the law enforcement feels very weak. Rarely may not even have happened, law enforcement is applied to Regional Head-Deputy Head candidates who caught giving money or other material known as money politics to win their partner is done transparently, let alone to court. In practice, law enforcement is applied only to the person who was caught giving money to someone for choosing a particular candidate. Whereas those arrested is only a messenger of others, for example the Campaign Team of Regional Head-Deputy Head Candidates.

Law enforcement is very weak and ineffective, and no deterrent for the perpetrators of money politics in addition to the practices of money politics also persists despite laws that govern the regional elections have been replaced.

The purpose of this study was to analyze the influential factors against law enforcement of money politics in regional elections, to find out the shortcomings of political money law enforcement and law enforcement to reconstruct the money politics of the regional elections based progressive law.

The results of the research done by separating the reconstruction of administrative sanctions such as canceling regional head-deputy head candidates who are convicted of money politics by the Provincial Election Commission or Regional Election Commission upon the recommendation of the Provincial Election Supervisory Board or Regional Election Supervisory Board where the regional head election ongoing and should not wait for the criminal process. While the process of examination of criminal offenses against the political actors of money in provincial or regional elections remain to be done in accordance with the provisions stipulated in the Criminal Procedure Code.

Keywords: Reconstruction, Law Enforcement, Money Politics